

IMB

PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN
BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Abstrak :

- Bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah semakin kompleks maka setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan izin mendirikan bangunan agar sesuai dengan penataan ruang guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenpu No. 29/PRT/M/2006; Permenpu No. 06/PRT/M/2007; Permenpu No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 94 Tahun 2010.
- Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan dan Persyaratan Penataan Bangunan; Keterangan Rencana Kabupaten; Klasifikasi Bangunan; IMB; Perubahan Izin; Kewajiban, Hak dan Larangan Penerima Izin; Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB; Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi IMB; Pemungutan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- Status :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati
 - Diundangkan pada tanggal 15 April 2011.